

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Padang

Alfachri Gusva Putra^{1*}, Fefri Indra Arza², Dian Indah Hayati³

^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: aigusvaputra88@gmail.com

Tanggal Masuk:

05 Juni 2025

Tanggal Revisi:

14 November 2025

Tanggal Diterima:

26 Desember 2025

Keywords: *Accountability; Effectiveness of BOP Fund Usage; Transparency.*

How to cite (APA 6th style)

Putra, A. G., Arza, F. I., & Hayati, D. I. (2026). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (1), 123-134.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i1.3080>

Abstract

To assist the implementation of non-formal education, since 2016 the government has provided Operational Assistance for Education (BOP) Equivalency to the Learning Activity Center (SKB) and Community Learning Activity Center (PKBM) in Padang City. This study aims to determine the influence of accountability and transparency on the effectiveness of the use of BOP funds in SKB and PKBM in Padang City. Quantitative method of multiple linear regression analysis was conducted to analyze the effect of accountability and transparency on the effectiveness of BOP fund usage in SKB and PKBM in Padang City. The results of the study showed that accountability and transparency, both individually and simultaneously, had a positive and significant effect on the effectiveness of BOP fund usage in SKB and PKBM in Padang City. This means that the application of good governance principles, especially accountability and transparency, is very important in improving the quality of non-formal education fund usage such as BOP.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah adalah pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sedangkan lembaga pendidikan non formal yang diadakan oleh masyarakat dalam bentuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No 81 Tahun 2013. Dengan strategi pendidikan berbasis masyarakat, satuan pendidikan nonformal berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan belajar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai program ditawarkan, termasuk yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan, pendidikan pemuda, pendidikan keterampilan hidup, dan jenis pendidikan lainnya yang dapat diikuti oleh masyarakat umum (Shomedran et al. 2020).

Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan instansi pembina dan pengawas penyelenggaraan pendidikan non formal di Kota Padang. Menurut data pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2024 di Kota Padang terdaftar 28 PKBM dan 2 SKB sebagai penyelenggara Pendidikan non formal (Kemendikbudristek 2024).

Salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dana bantuan operasional atau BOP (Amelinda et al., 2023). Secara tidak langsung, dana BOP berperan penting dalam peningkatan standar pendidikan. Selain itu, dengan adanya dana BOP diharapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh SKB dan PKBM dapat diakses oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau kurang mampu secara finansial.

Akuntabilitas finansial merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban badan publik untuk memanfaatkan dana publik (*public money*) dengan cara yang ekonomis, efisien dan efektif, sehingga mencegah pemborosan dan kebocoran dana, serta tindak korupsi dan kolusi (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini, akuntabilitas mengacu pada pendekatan yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana BOP untuk mendapatkan laporan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Kesalahpahaman dalam mengelola bisa membuat kendala dalam melaksanakan Pengelolaan disekolah. Dengan karakteristik arahan yang ada pada juknis dana BOS dapat mengundang arti atau makna yang berbeda-beda kepada pihak Pengelolaan Dana BOS (Anis Watin Izzah, 2018). Berdasarkan informasi yang tercantum pada sistem informasi BOSP Salur data Kota Padang, tercatat alokasi BOP Kesetaraan sebesar Rp. 24.417.700.000. Informasi dari narasumber di Dinas Pendidikan Kota Padang menunjukkan bahwa pelaporan penggunaan dana BOSP Kesetaraan oleh PKBM di Kota Padang masih sering terlambat dan mengandung banyak kesalahan. Selain itu, hasil audit Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Kota Padang menemukan beberapa PKBM yang harus mengembalikan dana BOSP Kesetaraan karena penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian Yoseptry dkk. (2023), pengelolaan dana BOS di SDN Cangkring 03 secara umum telah sesuai dengan pedoman teknis. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan di beberapa area, seperti pengeluaran dana untuk program di luar RKAS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mempersulit prosedur pelaporan, serta keterlambatan pengelola kegiatan dalam menyusun dan menyampaikan anggaran kepada pengelola dana BOS.

Selain masalah penyimpangan, berdasarkan data yang ada dilapangan masih terdapat sejumlah yayasan sekolah yang masih belum menjalankan pengelolaan keuangan sekolah secara memadai. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya dana, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang mengatur penggunaan dana alokasi khusus nonfisik (Larasati, 2021).

Untuk mendeteksi dan mengurangi kejadian penipuan dalam dana pendidikan saat ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi komponen penting dalam pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan. Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana demi kepentingan publik tidak hanya penting untuk mematuhi regulasi atau peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas program melalui peningkatan kepercayaan publik. Menurut penelitian sejenis yang diteliti oleh Simamora et al. (2024), menyebutkan bahwa baik prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan sudah bagus ditandai dengan rekapitulasi anggaran belanja penggunaan dana BOS pada tiap semester dan keterbukaan penyusunan RKAS.

Sebagai upaya dalam mencapai penggunaan dana yang efektif, diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pertumbuhan kapasitas sumber daya manusia dalam

penggunaan dana BOP. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana akuntabilitas dan transparansi memengaruhi efektivitas penggunaan dana BOP di PKBM dan SKB. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis efektivitas penggunaan dana BOP melalui perspektif Good Governance, serta menguji secara empiris peran akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pendidikan nonformal.

Melalui penelitian ini diharapkan akan didapat informasi hasil penelitian yang menggambarkan secara lebih jelas apakah akuntabilitas dan transparansi akan memberikan kontribusi yang positif dan berguna terhadap efektivitas penggunaan dana BOP di PKBM dan SKB Kota Padang, sehingga jika ini diketahui akan menjadi dorongan dalam melakukan perbaikan pada tata kelola (*good governance*) khususnya penggunaan dana BOP yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di PKBM dan SKB lebih baik lagi.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Good Governance

Berdasarkan pengertian Mardiasmo (2009) *Good Governance* didefinisikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Sistem tata kelola yang baik dan bersih sering kali didefinisikan sebagai sistem yang menggunakan metode transparan untuk menetapkan tujuan pemerintah, evaluasi kinerja, dan pencapaian. Menurut Agoes (2013) *Good Governance* diartikan untuk mengendalikan bagaimana hubungan antara tanggung jawab komite, peran direktur, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya.

Penelitian ini didasarkan pada Grand Theory of Good Governance, yaitu prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, variabel akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip Good Governance, yang secara teoritis diyakini mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana publik.

Akuntabilitas

Berdasarkan Mardiasmo (2018) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanat (*agent*) untuk menjawab kepada pemberi amanat (*principal*), yang memiliki kekuasaan dan hak untuk menuntut akuntabilitas, dan untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tindakan yang berada di bawah lingkup kewenangannya.

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pihak yang mengelola dana untuk menyusun laporan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup perencanaan, pengeluaran, serta hasil dari penggunaan dana tersebut. Pihak yang bertanggung jawab menggunakan dana harus memastikan bahwa uang itu digunakan untuk tujuan yang diinginkan, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.

Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi terkait penggunaan dana, termasuk bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Transparansi juga membantu mencegah penyalahgunaan dana, karena dengan adanya informasi yang terbuka, pihak-pihak yang berwenang atau masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

Menurut Tahir (2015), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam berbagi informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik dengan mereka yang

membutuhkannya untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Dengan adanya transparansi memungkinkan untuk memantau semua tindakan atau kebijakan dan menghentikan terjadinya penipuan atau penyimpangan.

Efektivitas Pengelolaan Dana BOP

Ihyaul (2009:26) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memastikan kelancaran kegiatan operasional lembaga Pendidikan. Keefektifan merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang paling efisien dan optimal.

Dalam konteks pengelolaan dana BOP, keefektifan penggunaan dana berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan operasional yang lebih baik. Dana BOSP dapat dilakukan secara efektif jika dana tersebut digunakan dengan tepat dan berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tingkat keberhasilan suatu program diukur dari efektivitasnya; semakin tinggi keberhasilan yang dicapai suatu program, semakin efektif pula program tersebut. (Rakhmawati, 2018).

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanat (*agent*) untuk menjawab kepada pemberi amanat (*principal*), yang memiliki kekuasaan dan hak untuk menuntut akuntabilitas, dan untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tindakan yang berada di bawah lingkup kewenangannya (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah berlangsung setiap periodenya. Akuntabilitas sendiri dapat memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggarannya. Efektivitas penggunaan dana BOP diukur dengan sejauh mana dana tersebut digunakan demi hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien akan sulit dicapai tanpa akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas diposisikan sebagai mekanisme akuntabilitas yang memastikan penggunaan dana BOP mematuhi standar, peraturan, dan tujuan yang ditetapkan. Dalam teori tata kelola yang baik, semakin tinggi akuntabilitas, semakin kecil potensi kesalahan, penyimpangan, dan pemborosan yang dapat menghambat efektivitas.

Menurut penelitian Rachman et al, (2022) akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana BOS. Efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA SASAMA dapat dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas; artinya, semakin akuntabel organisasinya, semakin efektif pengelolaan dana BOS, dan sebaliknya. Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana BOP karena dengan penggunaan dana yang akuntabel ditandai dengan adanya catatan, laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, maka penggunaan dana akan lebih efektif. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP

Menurut Tahir (2015) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam berbagi informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik dengan mereka yang membutuhkannya untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Transparansi memiliki makna yaitu ketersediaan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu demi kepentingan publik.

Transparansi dalam pengelolaan dana mengacu pada keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya, serta kemampuan pihak lain untuk memeriksa dan mengevaluasi proses tersebut. Dalam hal ini, transparansi bukan hanya sekadar membuka data, tetapi juga membuat informasi yang relevan mudah diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Sebagai bentuk pengawasan pada tata kelola yang baik, transparansi berperan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar, oleh karena itu tata kelola yang baik menyatakan bahwa efektivitas tidak dapat dicapai tanpa arus informasi yang terbuka.

Menurut penelitian Pratama (2017) menemukan bahwa efisiensi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dipengaruhi secara positif oleh transparansi. Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana BOP karena ketika adanya keterbukaan informasi dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan ada kontrol dari berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelola dana. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini merupakan jenis peneliti kuantitatif dengan menggunakan kausatif yang digunakan untuk menguji seberapa besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Padang yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Agar data yang dikumpulkan lebih lengkap dan *representative*, penelitian ini memanfaatkan sampling jenuh untuk menentukan metode pengambilan sampel. Sugiyono (2020:133) menyebutkan sampling jenuh juga diartikan dimana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Penelitian menggunakan Teknik analisis yang dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, lalu melakukan uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 30.

Definisi operasional variabel

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) dalam mempertanggungjawabkan, penyajian, pelaporan dan pengungkapan dalam semua aspek kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya (Nurhayati et al, 2018). Akuntabilitas diukur dengan menggunakan 5 item indikator yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu (Trisnawati, 2018) : Ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban, Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, Sasaran yang jelas, Audit rutin terhadap laporan keuangan dan Penyusunan sudah sesuai dengan pedoman.

Transparansi

Transparansi merupakan sebuah prinsip yang memberikan jaminan adanya kebebasan pada tiap-tiap orang guna mendapatkan informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi yang berisi proses, kebijakan, serta pelaksanaannya, dan hasil yang diinginkan. Transparansi diartikan sebagai adanya keterbukaan dalam pengawasan (Trisnawati, 2018). Transparansi diukur dengan menggunakan 5 item indikator yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu (Trisnawati, 2018) : Kemudahan akses informasi,

Kejelasan informasi, Keterlibatan pihak terkait dalam pengambilan keputusan, Laporan keuangan diakses secara rutin dan Transparansi pengelolaan anggaran.

Efektivitas Penggunaan Dana BOP

Efektivitas dapat diartikan sebagai terjaminnya pelaksanaan proses layanan yang bertanggung jawab dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Ismara et al, 2019). Efektivitas Penggunaan Dana BOP diukur dengan menggunakan 4 item indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Ismara et al, 2019) : Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, Kemudahan dalam semua pengelolaan organisasi, Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan lembaga Pendidikan dan Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan lembaga Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Survei mengungkapkan bahwa responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada PKBM dan SKB di Kota Padang. Menurut survey, karakteristik responden umumnya ditemukan berdasarkan jabatan, jenis kelamin, dan masa kerja. Hal ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang responden yang dapat memengaruhi persepsi dan tanggapan mereka terhadap variabel yang diteliti.

Pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebarkan, telah terkumpul sebanyak 97 kuesioner yang kembali dan layak diolah dengan persentase respon 97%.

Tabel 1
Jumlah Kuesioner yang Disebarkan, Dikembalikan dan Diproses

No.	Kuesioner	Jumlah
1.	Kuesioner yang Disebarkan	100
2.	Kuesioner yang Dikembalikan	97
3.	Kuesioner yang Diproses	97
	Tingkat respon	97%
	Jumlah total kuesioner yang dapat diproses	97

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah Bendahara BOP (29,90%), diikuti oleh Sekretaris (28,86%) dan Kepala SKB/PKBM (27,84%). Sementara itu, Pamong Belajar merupakan kelompok responden terkecil dengan persentase sebesar 13,40%.

Tabel 2
Jabatan Responden

No.	Jabatan	Banyaknya	Persentase (%)
1.	Kepala SKB/PKBM	27	27,84
2.	Bendahara BOP	29	29,90
3.	Sekretaris	28	28,86
4.	Pamong Belajar	13	13,40
	Total	97	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 3, mayoritas responden merupakan perempuan, berjumlah 69 orang atau sebesar 71,13%. Sementara itu, responden laki-laki tercatat sebanyak 28 orang atau 28,87%. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan PKBM dan SKB di Kota Padang cukup dominan.

Tabel 3
Jenis Kelamin Responden

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	28	28,87
2.	Perempuan	69	71,13
	Total	97	100,00

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4
Deskripsi statistik variabel penelitian

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	97	1,14	5	4,30	0,760
Transparansi	97	1,14	5	3,98	0,830
Efektivitas Penggunaan Dana BOP	97	1,86	5	4,27	0,690

(sumber: SPSS versi 30)

Statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,30 dengan standar deviasi 0,760, berada dalam rentang antara 1,14 hingga 5. Untuk variabel Transparansi, nilai rata-ratanya tercatat 3,98 dengan standar deviasi 0,830, dan berkisar dari nilai minimum 1,14 hingga maksimum 5. Sementara itu, variabel Efektivitas Penggunaan Dana BOP memiliki rata-rata 4,27, standar deviasi 0,690, dengan nilai terendah 1,86 dan tertinggi 5.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.21644308
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.071
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.093

(sumber: SPSS versi 30)

Menurut Tabel Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.093. yang berarti nilai ini lebih besar daripada 0,05 yang menjadi batas nilai paling rendah dalam pengujian normalitas data. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa data sampel penelitian ini berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	Akuntabilitas	.847	1.181
	Transparansi	.847	1.181

(sumber: SPSS versi 30)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dengan SPSS versi 30, didapatkan nilai VIF < 10 atau Tolerance > 0,01, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a		t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.971	1.909		.509
	Akuntabilitas	-.026	.061	-.049	.666
	Transparansi	.002	.057	.005	.967

(sumber: SPSS versi 30)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1) memiliki signifikansi sebesar $0,666 > 0,05$ terhadap residual absolut, sedangkan variabel Transparansi (X2) memiliki signifikansi sebesar $0,967 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a		t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.839	1.909		4.106
	Akuntabilitas	.675	.061	.761	11.136
	Transparansi	.071	.057	.085	1.242

(sumber: SPSS versi 30)

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui antaranya:

1. Konstan = 7,839 (positif), artinya bila akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) bernilai 0 maka efektivitas penggunaan dana BOP sebesar 7,839 satuan.
2. Koefisien $b_1 = 0,675$ (positif), artinya akuntabilitas meningkat 1% maka akan diikuti efektivitas penggunaan dana BOP sebesar = 0,675 satuan.
3. Koefisien $b_2 = 0,71$ (positif), artinya transparansi meningkat 1% maka akan diikuti efektivitas penggunaan dana BOP sebesar = 0,71 satuan.

Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 9
Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	808.151	2	404.075	80.502	<.001 ^b
	Residual	461.786	94	5.019		
	Total	1269.937	96			

(sumber: SPSS versi 30)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa F hitung $\geq$ F tabel yaitu $80,502 \geq 3,093$ dan nilai signifikansi $0,001 \leq 0,05$. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas penggunaan dana BOP.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10
Uji T

Coefficients ^a				
No	Hipotesis	t	Sig.	Kesimpulan
1	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP	11.136	<.001	Diterima
2	Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP	1.242	.217	Ditolak

(sumber: SPSS versi 30)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai positif, dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $11,136 > 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap kesulitan keuangan. Namun, variabel transparansi (X2) tidak signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh signifikansinya sebesar $0,217 > 0,05$. Selanjutnya, $1,242 < 1,661$ menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap seberapa baik dana BOP digunakan.

Koefisien Determinasi

Tabel 11
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.636	.628	2.240

Dari Tabel 6 diketahui untuk menghitung besarnya pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap efektivitas penggunaan dana BOP (Y) dari tabel Model Summary, R Square = 0,628 ini berarti bahwa kontribusi akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap efektivitas penggunaan dana BOP (Y) adalah sebesar 62,8% dan 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor akuntabilitas dan transparansi.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana BOP pada PKBM dan SKB di Kota Padang. Temuan ini dengan hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman et al (2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan efektifitas suatu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sebagai bagian dari Tata Kelola yang Baik, akuntabilitas berfungsi untuk memastikan pengelolaan dana BOP dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga mendukung tercapainya efektivitas penggunaan dana BOP. Akuntabilitas yang baik yang ditunjukkan oleh indikator-indikator seperti keterbukaan terhadap dilakukannya pemeriksaan dan audit, mekanisme yang jelas untuk dilakukannya evaluasi, serta tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang mana hal ini secara langsung meningkatkan efektivitas karena dana digunakan sesuai kebutuhan dan rencana kerja.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP

Berdasarkan temuan penelitian, transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana BOP di PKBM dan SKB Kota Padang. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOP. Menurut Sri Minarti (2011) Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi merupakan komponen penting tata kelola pemerintahan yang baik karena memfasilitasi pengawasan terbaik. Pengelolaan dana BOP yang lebih baik difasilitasi oleh ketersediaan informasi yang jelas dan transparan. Meskipun secara statistik menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan. Transparansi mungkin belum dijalankan secara maksimal atau belum dirasakan manfaatnya, oleh karena itu perlu upaya agar informasi penggunaan dana disebarluaskan secara lebih jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Penelitian ini memberikan dasar kuat bahwa peningkatan efektivitas penggunaan dana BOP di SKB dan PKBM dapat dicapai melalui penguatan akuntabilitas dan perbaikan dalam pelaksanaan transparansi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP. Temuan ini mendukung teori Tata Kelola yang Baik yang menekankan bahwa akuntabilitas merupakan pilar utama dalam memastikan dana publik digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana BOP. Transparansi merupakan salah satu komponen Good Governance, namun penerapannya dalam konteks PKBM dan SKB di Kota Padang belum optimal sehingga belum terasa dampaknya terhadap peningkatan efisiensi penggunaan dana.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dasar *Good Governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi, memiliki dampak positif terhadap efektivitas penggunaan dana

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Dengan demikian, penelitian ini mendukung teori *Good Governance* bahwa kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan produktivitas organisasi, termasuk dalam hal penggunaan dana secara efisien dan bertanggung jawab.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa keterbatasan, antara lain: Penelitian ini hanya melihat dua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Banyak variabel lain yang tidak diteliti juga dapat berdampak pada efektivitas penggunaan BOP. Keterbatasan dalam instrumen pengumpulan data yang hanya diperoleh melalui kuesioner. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam penelitian karena responden mungkin tidak sepenuhnya objektif dalam memahami setiap pertanyaan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, saran yang bisa diberikan peneliti adalah sebagai berikut: Penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, antara lain dengan memperluas wilayah cakupan studi serta menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi efektivitas penggunaan dana, seperti kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan sistem monitoring serta evaluasi. Dalam penelitian ini masih terbatas pada kuesioner, maka untuk penelitian selanjutnya selain menggunakan kuesioner juga dapat dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, D., Asbari, M., Kunci, K., & Paud Peningkatan dan Pendanaan, P. (2023). Transformasi Pendidikan PAUD dan Kesetaraan: Akselerasi Peningkatan dan Pendanaan. *Journal of Information Systems and Management*, 02(06), 13–17.
- Agoes, 2013. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. *Jurnal. Universitas Sumatra Utara*.
- Anis Watin Izzah, Y. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional.
- Ihyaul, U. (2009). *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Edisi ke 1 Graha Ilmu. Yogyakarta
- Ismara, K. I., Soeharto, Andayani, S., Supriadi, D., Prianto, E., & Khurniawan, A. W. (2019). *Good School Governance* Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi Sekolah Vokasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Data Pokok Pendidikan*.
- Larasati, P. A. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di Kb Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1-16
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset
- Minarti, Sri. (2011), *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*; Yogyakarta: Ar-Ruuz Media.
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., & Oktaroza, M. L. (2018). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakatpada Badan Amil Zakat (Baz) Di Jawa Barat. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 4(1), 577-584.
- Pratama, L. J. I. (2017). Analisis pengaruh prinsip good governance terhadap pencapaian tujuan dana bantuan operasional sekolah.

- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R.M.T. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA SASAMA*. AKURAT: Jurnal Ilmiah Akutansi. Volume 13, Nomor 3. hlm 73-86
- Rakhmawati, I. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi*. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah. 1(1), 95.
- Simamora, A.D., Maisyarah, R., & Tripriyono, A. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Sds Advent 6 Medan, 4(2). 121-131.
- Shomedran, Nengsih, Y.K., Tahyudun, D., & Hakim, I.A. (2020). Peran Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Membangun Mutu Sumber Daya Manusia. Comm-Edu (Community Education Journal). 3(3), 271-277
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah. Bandung: Alfa Beta.
- Trisnawati, F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kota Pekanbaru. Jurnal *Al-Iqtishad*, 1-19
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yoseptry, R., Nasir, S.M., & Darmawan, I. (2023). Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03. Bandung, 6(2). 553-566